

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Martajaya, D. S. (2021). Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten. 109-119.
- Bestari, N. P. (2021, Desember 16). *Menkes Umumkan RI Deteksi Kasus Covid-19 Varian Omicron*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211216104252-37-299713/menkes-umumkan-ri-deteksi-kasus-covid-19-varian-omicron>
- Heri Sutanto, P. H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. 1-10.
- Junaidi, M. S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Halu Oleo Law Review*. Vol.4 Issue 2, 145-156.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021. Jakarta.
- Luki Gerald, N. R. (2022). Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. 51-60.
- Maun, C. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 1.
- Menteri Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri. (2021). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Jakarta.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Jakarta.
- Michael Hardi, H. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). 266-272.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta

- Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta.
- Putri, S. (2021). Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. Tangerang Selatan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wonorejo Tahun 2017-2023. (t.thn.).
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Siallagan, W. A. (2020, Juni 15). *Redam Kesulitan Ekonomi Akibat COVID-19, Pemerintah Lakukan Upaya Ini*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/redam-kesulitan-ekonomi-akibat-covid-19-pemerintah-lakukan-upaya-ini/>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widodo, e. a. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.